



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENETAPAN TERSANGKA KASUS KORUPSI GUBERNUR PAPUA

Debora Sanur L.
Analisis Legislatif Ahli Madya
debora.sanur@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan bahwa Gubernur Papua, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Lukas ditetapkan terlibat kasus korupsi oleh KPK setelah menerima gratifikasi Rp.1 miliar. Surat KPK menyatakan bahwa Lukas Enembe resmi menjadi tersangka sejak tanggal 5 September 2022 dan dipanggil untuk diperiksa di Mako Brimob Polda Papua pada Senin, 12 September 2022. Namun karena alasan sakit, Lukas tidak memenuhi panggilan pemeriksaan itu.

Sebelumnya KPK telah melakukan penetapan tersangka kepada dua kepala daerah lainnya di Papua, yaitu Bupati Mimika dan Bupati Mamberamo Tengah. Ketiga kepala daerah di Papua yang telah menjadi tersangka merupakan tindak lanjut KPK berdasarkan laporan masyarakat. Gratifikasi atau suap dapat terjadi terkait dengan proses perizinan dan proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini dana yang disalahgunakan berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana komponen dana Otonomi Khusus (Otsus) juga termasuk di dalamnya.

Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, sebelum kasus gratifikasi itu, Lukas juga diduga memiliki uang puluhan miliar rupiah dalam beberapa rekening bank miliknya yang dicurigai merupakan hasil dari suap dan korupsi. Lukas juga telah beberapa kali terlibat dalam kasus korupsi. Kasus tersebut di antaranya menjadi tersangka pada kasus Pilkada 2017 di Kabupaten Tolikara, diperiksa atas kasus penyimpangan anggaran Pemprov Papua 2017, dan mendapat pemanggilan oleh penyidik atas kasus dugaan korupsi dana beasiswa Papua 2016. Ada 12 hasil analisis dari PPATK yang disampaikan kepada KPK terkait dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari pengelolaan uang dengan jumlah ratusan miliar rupiah. PPATK juga mengungkap tentang dugaan transaksi perjudian yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe senilai 55 juta dollar atau Rp 560 miliar ke sebuah kasino. Selain itu, juga aliran dana 5 juta Dollar Singapura atau dalam mata uang Indonesia sekitar Rp 53,132 miliar. Kemudian ditemukan transaksi pembelian perhiasan mewah, salah satunya jam tangan senilai Rp 550 juta. Berdasarkan hal tersebut PPATK telah membekukan rekening Lukas Enembe di 11 penyedia jasa keuangan yang nilainya mencapai Rp. 71 miliar.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Lukas merupakan temuan dan fakta hukum tengah diselidiki oleh KPK dan bukanlah rekayasa politik. Kasus ini juga telah diselidiki oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan PPATK. Meski demikian, pernyataan Mahfud tersebut mendapatkan respons dari juru bicara Lukas Enembe, Muhammad Rifai Darus. Rifai menilai bahwa sejumlah opini dan sangkaan terhadap Lukas Enembe merupakan pembunuhan karakter yang mendahului proses hukum.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai bahwa KPK perlu untuk melibatkan TNI dan Brimob dalam melakukan pemeriksaan terhadap Lukas. Sejak Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka sekelompok massa pendukungnya melakukan penjagaan pada rumah Lukas dan demonstrasi pada tanggal 20 September 2022. Tokoh adat Papua Tabi, Yanto Eluay juga telah menghimbau agar demonstrasi para pendukung Lukas digelar secara aman dan tertib serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Atensi DPR

Papua merupakan salah satu provinsi yang menjadi daerah Otsus, sehingga memiliki kewenangan khusus dan berhak menerima dana Otsus dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Terkait kasus yang terjadi di Papua, Komisi II DPR RI yang bermitra kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, perlu turut mengawasi kinerja setiap Gubernur, termasuk Gubernur Papua. Penyelewengan anggaran negara salah satunya dana Otsus rentan terjadi.

Selain itu, melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Otsus DPR RI, DPR RI perlu terus memantau pelaksanaan UU Otsus dan mengevaluasi pelaksanaannya yang belum maksimal. Komisi II dan Tim Pengawas Pelaksanaan Otsus DPR RI perlu mendorong masyarakat lokal untuk turut aktif mengawasi kinerja setiap kepala daerah di Papua, terutama dalam penggunaan dana Otsus Papua. DPR RI juga harus mendorong KPK untuk mengambil langkah tegas dan terukur dalam mengusut dugaan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sumber

cnnindonesia.com, 19 September 2022;
detik.com, 19 September 2022;
kompas.com, 19 September 2022;
papua.inews.id, 19 September 2022;
suara.com, 19 September 2022;
tempo.co, 19 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.